

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....1

BAB I PENDAHULUAN2

1.1. Latar Belakang2

1.2. Landasan Hukum3

1.3. Maksud dan Tujuan4

1.4. Sistematika Penulisan.....4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPSDM Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPSDM17

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPSDM19

2.4 Review Terhadap Rancangan AkhirRKPD.....21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....55

3.1 Tela’ah Terhadap Kebijakan Nasional55

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD.....57

3.3 Program dan Kegiatan57

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 202373

BAB V P E N U T U P79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya di bidang pembinaan kompetensi aparatur dengan tugas pokok melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi. Dengan demikian, maka Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja PD membuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 diupayakan terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2023, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jambi. serta harus menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang dilaksanakan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, berupaya melakukan evaluasi dan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang lebih baik.

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini merupakan serangkaian rencana program dan kegiatan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh sub unit kerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi tahun 2023 dibuat oleh Tim Penyusun pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan perencanaan tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan dan mengikat seluruh komponen/jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi untuk dijadikan rujukan dan acuan dalam merencanakan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pembinaan kompetensi aparatur.

1.2. Landasan Hukum

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemerintah dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- g. Permendagri Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- h. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi

- j. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi unit-unit dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Dinas-Dinas Teknis. Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. lembaga-lembaga teknis dan Rumah sakit daerah Provinsi Jambi
- k. Instruksi Gubernur Jambi. Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Diklat Satu Pintu.
- l. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi tentang Penunjukan Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023, pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Agar mampu tetap tampil secara konsisten, responsive dan unggul pada persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus dinamis dan menyesuaikan kepada perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan tersebut harus gradual, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal.

Untuk mencapai hasil yang optimal dan konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan suatu rencana yang menjelaskan mengenai berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih lanjut tujuan dari Rancangan Akhir Rencana Kerja ini adalah:

1. Menjadi perekat dan pemersatu berbagai rencana kerja yang ada;
2. Merumuskan dan memperlihatkan apa yang ingin dicapai oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi selama satu tahun serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rancangan Akhir Rencana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi ini dibagi kedalam 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN :

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan perangkat daerah yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Penyusunan Renja dimaksudkan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPSDM Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah memuat tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPSDM Tahun lalu, dan perkiraan capaian tahun berjalan., mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada penyusunan Renja BPSDM sudah disahkan Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan AkhirRKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan AkhirRKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan AkhirRKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan AkhirRKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

C. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan AkhirRKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

D. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

E. BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPSDM Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Aparatur Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya mampu menunjukkan kinerja optimalnya. hal ini ditandai dengan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja aparatur untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk tuntutan peningkatan kesejahteraan masih terus dirasakan dan didengarkan. Dalam memenuhi tuntutan ini, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, produktif, transparan, bebas KKN dan netral yang pada gilirannya dapat memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, yaitu aparatur atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memberikan pelayanan prima dan meningkatkan kesejahteraan kepada semua pihak tanpa membedakan asal usul ataupun dari partai politik tertentu

Pada tahun 2016 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang dalam hal ini Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang diatur pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 59 Tahun 2016 yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2021 pelaksanaan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang ditunjang dengan APBD murni untuk belanja daerah sebesar Rp. 22.371.384.470,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 22.034.043.092,- dan belanja modal sebesar Rp 337.341.378,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung, yang didukung oleh 2 program dan 8 kegiatan.

Realisasi dari masing-masing belanja meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 12.896.105.047,-, Belanja barang dan Jasa sebesar Rp. 7.861.462.178,- Belanja modal Rp. 309.352.702,- sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Gambar 1 Anggaran dan Realisasi Thn 2021

Penjabaran dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

**Tabel 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
per 31 Desember 2021**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	SILPA (Rp)
1	2	3	4	5
I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	380.527.320	347.969.609	91,44	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	152.917.420	128.077.517	83,76	24.839.903
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.432.100	35.900.000	88,79	4.532.100
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	187.177.800	183.992.092	98,30	3.185.708
II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.173.401.931	12.612.821.047	95,74	
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	302.003.000	296.412.000	98,15	5.591.000
III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	260.622.544	233.881.100	89,74	26.741.444

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	SILPA (Rp)
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	260.622.544	233.881.100	89,74	26.741.444
IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.127.602.569	1.072.360.859	95,10	55.241.710
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	117.719.295	108.835.900	92,45	8.883.395
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	590.396.734	555.784.602	94,14	34.612.132
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.938.000	52.909.700	99,95	28.300
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.901.390	35.569.000	99,07	332.390
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.647.150	319.261.657	96,56	11.385.493
V. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.656.060.118	1.512.870.529	91,35	143.189.589
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.596.472	1.469.000	40,85	2.127.472
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	930.971.206	806.771.529	86,66	124.199.677
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.043.440	35.830.000	68,85	16.213.440
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	669.449.000	668.800.000	99,90	649.000
IV. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	781.731.905	761.947.930	97,47	19.783.975
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	258.490.000	251.171.200	97,17	7.318.800
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	223.281.905	211.934.730	94,92	11.347.175
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	299.960.000	298.842.000	99,63	1.118.000

Tabel 2. Daftar Realisasi Anggaran Per Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
 per 31 Desember 2021

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	SILPA (Rp)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.689.435.083	4.228.916.853	90,2	460.518.230
I. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	1.341.568.071	1.231.533.504	91,80	110.034.567
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.341.568.071	1.231.533.504	91,80	110.034.567
II. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3.347.867.012	2.997.383.349	89,53	350.483.663
Sub Pelaksanaan Sertifikasi kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	574.360.124	410.260.112	71,43	164.100.012
Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	182.491.100	174.186.167	95,45	8.304.933
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	166.071.540	153.913.970	92,68	12.157.570
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan rjabatan	2.424.944.248	2.259.023.100	93,16	165.921.148

Berikut ini akan disajikan secara lebih rinci mengenai realisasi dan capaian anggaran serta permasalahan yang dihadapi dari masing-masing kegiatan dan output yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi tahun 2021.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 4.508.547.456,- atau sama dengan 20,15% dari total anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, yaitu sebesar Rp. 22.371.384.470,-. Adapun rincian penggunaan anggaran program tersebut adalah melalui belanja kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah semula dianggarkan sebesar 344.777.020,- menjadi Rp. 380.527.320,- atau sebesar 8,44% dari total anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah semula dianggarkan 117.167.120,- pada perubahan dianggarkan sebesar Rp. 152.917.420,- atau sebesar 40,19% dari total anggaran kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dari anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp.128.077.517,- atau sebesar 83,76% yang dipergunakan untuk biaya cetak, pelaksanaan rapat koordinasi bidang pengembangan sumber daya manusia.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dianggarkan sebesar Rp. 40.432.100,- atau sebesar 26,44% dari total anggaran kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dari anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dapat direalisasikan sebesar Rp. 35.900.000,- atau sebesar 88,79% yang dipergunakan untuk cetak laporan kinerja dan pembayaran tenaga administrasi/PTT.
- c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Ikhtisar dianggarkan sebesar Rp. 187.177.800,- atau sebesar 49,19% dari total anggaran kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dari anggaran Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Ikhtisar dapat direalisasikan sebesar Rp. 183.992.092,- atau sebesar 98,30% yang dipergunakan untuk monitoring evaluasi peserta pasca dikalt dan monitoring evaluasi pelaksanaan orientasi lapangan.

II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

dianggarkan sebesar Rp. 13.475.404.931,- atau sebesar 76,21% dari total anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN semula dianggarkan sebesar Rp. 12.938.062.021,- menjadi Rp. 13.173.401.931,- atau sebesar 97,76% dari total anggaran kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Dari anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Ikhtisar dapat direalisasikan

sebesar Rp. 12.612821.047,- atau sama dengan 94,17% yang dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN BPSDM Provinsi Jambi.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas semula dianggarkan sebesar Rp. 273.993.000,- menjadi 302.003.000,- atau sama dengan 2,24% dari total anggaran kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Dari anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas dapat direalisasikan sebesar Rp.296.412.000,- sama dengan 98,15% yang dipergunakan untuk pembayaran honorarium pengelola keuangan BPSDM Provinsi Jambi dan honor-honor lainnya.

III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dianggarkan semula sebesar Rp. 284.183.410,- menjadi Rp. 260.622.544,- atau sama dengan 1,47% dari total anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi semula sebesar Rp. 284.183.410,- menjadi Rp. 260.622.544,- atau sama dengan 100% dari total anggaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Dari anggaran Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dapat direalisasikan sebesar Rp.233.881.100,- sama dengan 89,74% yang dipergunakan untuk pengembangan kompetensi aparatur internal dan orasi ilmiah.

IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dianggarkan semula Rp. 846.091.981,- menjadi Rp. 1.127.602.569,- sama dengan 6,38% dari total anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik semula sebesar Rp. 67.7236.295,- menjadi Rp. 117.719.295,- sama dengan 10,44% dari total anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dari anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dapat direalisasikan sebesar Rp. 108.835.900,- sama dengan 92,45% yang dipergunakan untuk pengadaan peralatan listrik.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor semula sebesar Rp. 398.214.506,- menjadi Rp.590.396.734,- sama dengan 52,36% dari total anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dari anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dapat direalisasikan sebesar Rp. 555.784.602,- sama dengan 94,14% yang dipergunakan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (TV, AC, tedmon, peralatan zoom meeting, access point, kursi tamu, gorden, dll).
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor semula sebesar Rp. 42.942.000,- menjadi 52.938.000,- sama dengan 4,69% dari total anggaran Kegiatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dari anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dapat direalisasikan sebesar Rp. 52.909.700,- sama dengan 99,95% yang dipergunakan untuk pengadaan makan minum rapat, makan minum penguat satpam.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan semula sebesar Rp. 26.808.980,- menjadi Rp. 35.901.390,- sama dengan 3,18% dari total anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dari anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dapat direalisasikan sebesar Rp. 35.569.000,- sama dengan 99,07% yang dipergunakan untuk pengadaan bahan cetak dan penggandaan.
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD semula sebesar Rp. 310.403.200,- menjadi Rp. 330.647.150,- sama dengan 29,32% dari total anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dari anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dapat direalisasikan sebesar Rp. 319.216.657,- sama dengan 96,56% yang dipergunakan untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

V. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dianggarkan semula Rp. 2.161.420.048,- menjadi 1.656.060.118,- sama dengan 9,37% dari dari total anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat semula sebesar Rp. 3.596.472,- sama dengan 0,22% dari total anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan tidak mengalami perubahan anggaran dengan realisasi sebesar Rp. 1.469.000,- sama dengan 40,86% yang dipergunakan untuk bahan-bahan pengiriman surat menyurat, dan biaya jasa pengiriman surat menyurat.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik semula sebesar Rp.1.474.252.200,- menjadi Rp. 930.971.206,- sama dengan 56,22% dari total anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi sebesar Rp.806.771.529,- sama dengan 86,66% yang dipergunakan untuk biaya belanja air bersih, listrik, internet.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor semula sebesar Rp. 14.122.376,- menjadi Rp. 52.043.440,- sama dengan 3,14% dari total anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 35.830.000,- sama dengan 68,85% yang dipergunakan untuk pengadaan banner, spanduk, papan ucapan, dan pemeliharaan aplikasi sikilat.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor semula sebesar Rp. 669.449.000 tidak mengalami perubahan anggaran sama dengan 40,42% dari

total anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 668.800.000,- sama dengan 99,90% dipergunakan untuk pembayaran jasa kebersihan kantor, taman, halaman dan honorarium satpam.

- VI. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dianggarkan sebesar Rp. 603.108.410,- menjadi Rp. 781.731.905,- sama dengan 4,42% dari total anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari :
- a. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran semula sebesar Rp. 224.360.000,- menjadi Rp. 258.490.000,- sama dengan 33,07% dari total anggaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan realisasi sebesar Rp. 251.171.200,- sama dengan 97,17% yang dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas dan pembayaran pajak kendaraan dinas.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan anggaran semula sebesar Rp. 178.788.410,- menjadi 223.281.905,- sama dengan 28,56% dari total anggaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan realisasi sebesar Rp. 251.171.200,- sama dengan 97,17% yang dipergunakan untuk pemeliharaan peralatan kantor.
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran semula sebesar Rp. 199.960.000,- menjadi Rp. 299.960.000,- sama dengan 38,37% dari total anggaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan realisasi sebesar Rp.298.842.000,- sama dengan 99,63% dipergunakan untuk rehabilitasi gedung kantor, rumah dinas dan lainnya.

B. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020, untuk pengembangan kompetensi ASN termasuk dalam program pengembangan sumber daya manusia, pada perubahan dianggarkan semula pada APBD Murni sebesar Rp. 4.684.408.672,- pada anggaran perubahan menjadi Rp. 4.689.435.083,- sama dengan 20,96% dari pagu indikatif perubahan tahun 2021.

- I. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
- Dianggarkan semula sebesar Rp. 1.413.666.736,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 1.341.568.071,- sama dengan 28,61 % dari anggaran program pengembangan sumber daya manusia terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan

Urusan Pemerintahan Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.231.533.504,- sama dengan 91,80%.

II. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Dianggarkan semula sebesar Rp. 3.270.741.936,- pada APBD-P menjadi Rp. 3.347.867.012,- sama dengan 71,39% dari anggaran Program pengembangan sumber daya manusia. yang terdiri dari :

- a. Sub Pelaksanaan Sertifikasi kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan anggaran semula sebesar Rp. 554.054.944,- menjadi 574.360.124,- atau sama dengan 17,16% dari angaran kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Sub Pelaksanaan Sertifikasi kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota merealisasikan anggaran sebesar Rp.410.260.112,- sama dengan 71,43% yang dipergunakan untuk Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Uji Kompetensi bagi Jabatan Pengawas dan Uji Kompetensi bagi Jabatan Administrator, Uji Kompetensi Ahli Cagar Budaya, Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa, Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Anti Korupsi.
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dengan anggaran semula sebesar Rp. 191.152.700,- menjadi Rp. 182.491.100,- sama dengan 31,77% dari anggaran Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi merealisasikan sebesar Rp. 174.186.167,- sama dengan 95,45% yang dipergunakan untuk Bimtek Penguatan Tenaga Pengembang Kompetensi Dalam Proses Pembelajaran Pelatihan dan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN.
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dengan anggaran semula sebesar Rp. 191.152.700,- menjadi Rp. 182.491.100 sama dengan 12,38% dari anggaran Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga merealisasikan sebesar Rp. 153.913.970,- sama dengan 92,68% yang dipergunakan untuk Pelatihan Elearning bagi ASN dilingkungan pemerintah provinsi jambi Kab/kota sub bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, Monitoring Evaluasi Pelaksanaan kerjasama Kabupaten/kota.

- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan dengan anggaran semula sebesar Rp. 2.357.444.752,- menjadi 2.424.944.248,- sama dengan 72,43% dari anggaran Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional merealisasikan sebesar Rp. 2.59.023.100,- sama dengan 93,16% yang dipergunakan untuk Bimtek Peningkatan Kinerja Tenaga Kearsipan bagi ASN, Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II, Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional PBJ , Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kasubbag Umum/Tu/Kepegawaian, Pelatihan Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Perencanaan, Seminar Bagi Kepala Opd, Seminar Bagi Lurah, Workshop Peningkatan Kapasitas Camat.

Kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi tidak tercapainya target kinerja dan realisasi keuangan dengan menata sistem perencanaan dan menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan, dan menganalisis atas capaian kinerja program dan kegiatan sebelumnya. Adapun rincian penggunaan anggaran program tersebut adalah melalui belanja kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPSDM

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang penunjang, dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjalankan fungsi menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja pelayanan BPSDM tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja Kunci dari Kementerian

Tabel 10. Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi

No	Indikator	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase penyelenggaraan pengembangan SDM aparatur	93 %	95 %	97 %	91 %	95 %	97 %	
2	Persentase kelulusan peserta pengembangan kompetensi dan setifikasi/uji kompetensi dan peserta	74 %	75 %	80 %	73 %	75 %	80 %	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPSDM

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral Pembangunan Nasional. selain berkepentingan terhadap penyelenggaraan pembangunan sektor nasional di daerah. juga berkepentingan terhadap pembangunan dalam dimensi kewilayahan. Dua kepentingan tersebut menjadikan aktivitas pembangunan daerah sekaligus dengan tujuan pencapaian sasaran sektoral nasional di daerah. serta tujuan pengintegrasian pembangunan antar sektor di dalam satu wilayah.

Desentralisasi secara tegas memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Dengan kata lain. porsi daerah untuk menentukan berbagai kebijakan publik sesuai dengan konteks daerahnya menjadi semakin besar. Pada saat yang sama. dinamika sosial. politik dan ekonomi dalam skala lokal maupun nasional akan terus berubah. Demikian pula dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta para stakeholders lainnya yang juga terus berubah dan harus direspon oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Sebagaimana diketahui bahwa pelayanan publik di Provinsi Jambi dewasa ini menjadi isu dan sekaligus merupakan gambaran masyarakat terhadap kualitas kinerja birokrasi pemerintah yang memiliki implikasi luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sejalan dengan diterbitkannya dan diberlakukannya berbagai regulasi antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. maka perbaikan kinerja pelayanan aparatur yang berkelanjutan perlu terus ditingkatkan sehingga akan mendorong terciptanya iklim kondusif bagi kegiatan penyelenggaraan pelayanan manajemen pemerintahan yang pada gilirannya akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Selain itu. perbaikan kinerja pelayanan bidang aparatur juga akan berdampak pada tumbuhnya kepercayaan (*trust*). dan legitimasi terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sehingga mampu memberikan daya dukung peningkatan partisipasi masyarakat. Hal ini mengingat bahwa peningkatan kualitas pelayanan khususnya pelayanan aparatur yang berkualitas merupakan salah satu

indikator terjadinya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kedudukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Gubernur. memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kompetensi aparatur di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. sebagaimana yang sebelum tahun 2017 diatur pada Peraturan Gubernur Jambi. nomor 31 Tahun 2008. dengan nama Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pendidikan dan pelatihan.

Untuk tahun 2017 sejalan dengan pergantian nomenklatur menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi. atau disebut BPSDM Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPSDM Provinsi dalam melaksanakan tugas. menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis. rencana. dan program pengembangan sumber daya manusia provinsi;
- b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- c. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pemantauan. evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Isu belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan permasalahan yang dihadapi Pemerintah di Provinsi Jambi. Hal ini tercermin dari

perolehan *Nilai SAKIP* Pemerintah Provinsi Jambi yang dilakukan Kementerian PAN & RB dapat juga dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah tingkat profesionalitas aparatur pemerintah daerah kemampuan penegakan hukum dan peraturan. kapasitas pemerintah desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah. transparansi dan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik.

Sedangkan permasalahan yang berhasil diidentifikasi melalui musrenbang / rapat koordinasi pada urusan pembangunan secara umum khususnya untuk bidang Aparatur yang merupakan domain Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi terdapat beberapa permasalahan. diantaranya; 1) belum optimalnya pembinaan dan pengembangan aparatur. 2) kapasitas sumberdaya aparatur yang perlu terus ditingkatkan. 3) rendahnya kesejahteraan pegawai. 4) belum optimalnya kinerja aparatur baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. kecamatan dan kelurahan/desa.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Perbandingan program dan kegiatan yang ada pada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, tidak ada perbedaan yang signifikan pada target capaian dan namu terdapat perbedaan pada pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan pada BPSDM Provinsi Jambi. Namun, tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih dapat mengalami perubahan karena pertimbangan program dan kegiatan prioritas serta hasil capaian pada tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021 Program dan Kegiatan mengacu pada Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi PD. Perbedaan tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun n-1) (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)*	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi keuangan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur	100 buku		100%	100%	100%	100 buku	100 buku	100 buku

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Kediklatan dan laporan kinerja	200 buku		100%	100%	100%	200 buku	200 buku	200 buku
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase evaluasi kinerja daerah (Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur) dan penelitian karya tulis ilmiah	50 laporan		100%	100%	100%	50 laporan	50 laporan	50 laporan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi keuangan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN			14 bulan	14 bulan	14 bulan			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	% Tingkat pemenuhan honorarium Tim Angka Kredit, Tim penjamin mutu SKPD, % Tingkat pemenuhan	7 dokumen		100%	100%	100%	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen

					honorarium panitia pelaksana kegiatan, pengelola keuangan SKPD, % Tingkat pemenuhan honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang SKPD, PPTK, staf PPTK, Staf PPKom, staf pejabat pengadaan, % Tingkat pemenuhan honorarium penyusun jurnal prajaiswara, % tingkat pemenuhan honorarium tim pengelola website								
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150 Orang					150 Orang	150 Orang	150 Orang
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase pengembangan kapasitas aparatur internal	100 orang		100%	100%	100%	80 orang	90 orang	90 orang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi umum PD	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket		100%	100%	100%	2 Paket	2 Paket	2 Paket
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Paket		100%	100%	100%	8 Paket	8 Paket	8 Paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket		100%	100%	100%	4 Paket	4 Paket	4 Paket

				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Paket		100%	100%	100%	7 Paket	7 Paket	7 Paket
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		100%	100%	100%	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan		100%	100%	100%	1 laporan	1 laporan	1 laporan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan		100%	100%	100%	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	3 Laporan		100%	100%	100%	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan

					Kantor										
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 laporan		100%	100%	100%	4 laporan	4 laporan	4 laporan	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan BMD	2 Unit		100%	100%	100%	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit					1 unit	1 unit	1 unit	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persenstase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 Unit		100%	100%	100%	50 Unit	50 Unit	50 Unit	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Persentase Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung	10 unit		100%	100%	100%	10 unit	10 unit	10 unit	

				Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya										
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1. Persentase penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur	99%		90%	90%	90%	95%	97%	97%		
					2. Persentase kelulusan peserta sertifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	84%		72%	72%	72%	75%	78%	78%		
				Pengembangan Kompetensi Teknis	jumlah peserta yang lulus pengembangan kompetensi teknis	700 orang					450 orang	600 orang	600 orang		
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan	jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi teknis, umum, inti dan pilihan	1.275 orang					945 orang	1.110 Orang	1.110 Orang		

					Urusan Pemerintahan Umum									
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Peserta yang lulus sertifikasi/uji kompetensi , pengembangan kompetensi manajerial, fungsional	700 orng					550 orng	600 orng	600 orng
					Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi						150 orang	165 orang	165 orang
					Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	pelaksanaan study tiru dan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN						2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
						JUMLAH PESERTA BIMTEK, WORKSHOP, TOT, MOT, TOC BAGI TENAGA PENGEMBANGAN						2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Tabel 11. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2023 BPSDM PROVINSI JAMBI

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Catatan Penting
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Jambi	NILAI SAKIP	81,0 %	25.155.000.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Jambi	NILAI SAKIP	81,0 %	17.824.822	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase pelaksanaan administrasi keuangan	100%	800.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase pelaksanaan administrasi keuangan	100%	275.661.784	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur	100 buku	350.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur	100 buku	158.763.784	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		persentase penyusunan dokumen RKA-SKPD	50 buku	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		persentase penyusunan dokumen RKA-SKPD	50 buku		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		persentase penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	30 buku	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		persentase penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	30 buku		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-		persentase penyusunan	50 buku	100.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-		persentase penyusunan	50 buku		

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Catatan Penting
	SKPD		DPA-SKPD		.000	SKPD		DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		persentase penyusunan perubahan DPA-SKPD	30 buku	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		persentase penyusunan perubahan DPA-SKPD	30 buku		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Terlaksananya Penyusunan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Kediklatan dan laporan kinerja	200 buku	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Terlaksananya Penyusunan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Kediklatan dan laporan kinerja	200 buku	43.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase evaluasi kinerja daerah (Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur) dan penelitian karya tulis ilmiah	50 laporan	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase evaluasi kinerja daerah (Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur) dan penelitian karya tulis ilmiah	50 laporan	73.398.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase pelaksanaan administrasi keuangan	100%	25.450.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase pelaksanaan administrasi keuangan	100%	14,625,208,550	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN		25.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN		14,424,108,550	
	Penyediaan Administrasi		% Tingkat pemenuhan	7 dokumen	450.000.000	Penyediaan Administrasi		% Tingkat pemenuhan	7 dokumen	201,100,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
	Pelaksanaan Tugas ASN		honorarium Tim Angka Kredit, Tim penjamin mutu SKPD, % Tingkat pemenuhan honorarium panitia pelaksana kegiatan, pengelola keuangan SKPD, % Tingkat pemenuhan honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang SKPD, PPTK, staf PPTK, Staf PPKom, stat pajabat pengadaan, % Tingkat pemenuhan honorarium penyusun jurnal prajaiswara, %			Pelaksanaan Tugas ASN		honorarium Tim Angka Kredit, Tim penjamin mutu SKPD, % Tingkat pemenuhan honorarium panitia pelaksana kegiatan, pengelola keuangan SKPD, % Tingkat pemenuhan honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang SKPD, PPTK, staf PPTK, Staf PPKom, stat pajabat pengadaan, % Tingkat pemenuhan honorarium penyusun jurnal prajaiswara, %			

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Catatan Penting
			tingkat pemenuhan honorarium tim pengelola website					tingkat pemenuhan honorarium tim pengelola website			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		persentase pelaksanaan administrasi BMD PD	100%	200.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		persentase pelaksanaan administrasi BMD PD	100%		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		persentase penyusunan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	4 dokumen	50.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		persentase penyusunan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	4 dokumen		
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		persentase Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		persentase Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 laporan		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	50.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 laporan	50.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 laporan		

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		persentase pelaksanaan administrasi retribusi daerah pendidikan dan pelatihan	100%	185.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		persentase pelaksanaan administrasi retribusi daerah pendidikan dan pelatihan	100%		
	Pengolahan Data Retribusi Daerah		persentase Pengolahan Data Retribusi Daerah	2 dokumen	185.000.000	Pengolahan Data Retribusi Daerah		persentase Pengolahan Data Retribusi Daerah	2 dokumen		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD	100%	1.580.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD	100%	148.000.000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	450.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150 Orang	200.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150 Orang	78.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	75.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dokumen		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	150.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen		
	Monitoring, Evaluasi,		Monitoring,	3		Monitoring, Evaluasi,		Monitoring,	3		

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
	dan Penilaian Kinerja Pegawai		Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	85.000.000	dan Penilaian Kinerja Pegawai		Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		persentase pengembangan kapasitas aparatur internal	90 orang	450.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		persentase pengembangan kapasitas aparatur internal	90 orang	70.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		persentase Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	85.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		persentase Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		85.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase pelaksanaan administrasi umum PD	100%	2.095.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase pelaksanaan administrasi umum PD	100%	445,951,345	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	180.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	32,298,950	
	Penyediaan Peralatan		jumlah jenis	8 Paket	400.000	Penyediaan Peralatan		jumlah jenis	8 Paket	158,162,695	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat if (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat if (Rp.000)	Catatan Penting
	dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		.000	dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	280.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	49,200,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Paket	175.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Paket	24,007,700	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 dokumen	175.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 dokumen		
	Penyediaan Bahan/Material		persentase Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Bahan/Material		persentase Penyediaan Bahan/Material	1 Paket		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	75.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	450.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	182,282,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		persentase Penatausahaan	1 dokumen	175.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		persentase Penatausahaan	1 dokumen	.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat if (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat if (Rp.000)	Catatan Penting
			Arsip Dinamis pada SKPD	en	.000			Arsip Dinamis pada SKPD	en		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		persentase Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokum en	85.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		persentase Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokum en		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		persentase pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3.705.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		persentase pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29 unit	550.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29 unit		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		persentase Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	480.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		persentase Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit		
	Pengadaan Mebel		Jumlah jenis Pengadaan	3 paket	400.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah jenis Pengadaan	3 paket		

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
			Mebel					Mebel			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	500.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit		
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		persentase Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2 unit	175.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		persentase Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2 unit		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	800.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	400.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	400.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		persentase penyediaan jasa	100%	2.145.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		persentase penyediaan jasa	100%	1,877,880,570	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Catatan Penting
	Pemerintahan Daerah		pelayanan umum kantor			Pemerintahan Daerah		pelayanan umum kantor			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1,700,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	1.000.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	1,144,986,690	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Laporan	175.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Laporan	15,153,880	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 laporan	950.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 laporan	716,040,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase pemeliharaan BMD	2 Unit	4.750.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase pemeliharaan BMD	2 Unit	452,120,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas		Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	29 Unit	400.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau		Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	29 Unit		

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Catatan Penting
	atau Kendaraan Dinas Jabatan		dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kendaraan Dinas Jabatan		dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	90.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	191,640,000	
	Pemeliharaan Mebel		Persentase Pemeliharaan Mebel	10 Unit	80.000.000	Pemeliharaan Mebel		Persentase Pemeliharaan Mebel	10 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 Unit	400.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 Unit	160,480,000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		persentase Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10 unit	80.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		persentase Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10 unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	10 unit	1.100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	10 unit	100,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
			Bangunan Lainnya					Bangunan Lainnya			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	2.400.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		1. Persentase penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur	97%	18.750.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		1. Persentase penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur	97%	4,513,528,041	
			2. Persentase kelulusan peserta sertifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	78%				2. Persentase kelulusan peserta sertifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	78%		

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Catatan Penting
	Pengembangan Kompetensi Teknis		jumlah peserta yang lulus pengembangan kompetensi teknis	600 orang	6.700.000.000	Pengembangan Kompetensi Teknis		jumlah peserta yang lulus pengembangan kompetensi teknis	600 orang	1,572,216,657	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		jumlah kebijakan teknis pusat yang disosialisasikan	1	250.000.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		jumlah kebijakan teknis pusat yang disosialisasikan	1		
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan		jumlah penyusunan standar perangkat pembelajaran	6 dokumen/diklar	250.000.000	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan		jumlah penyusunan standar perangkat pembelajaran	6 dokumen/diklar		

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Catatan Penting
	Pemerintahan Umum					Umum					
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi teknis, umum, inti dan pilihan	1.110 Orang	6.000.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi teknis, umum, inti dan pilihan	1.110 Orang	1,572,216,657	
	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Frekuensi pembinaan Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	2 dokumen	200.000.000	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Frekuensi pembinaan Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	2 dokumen		

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Catatan Penting
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah Peserta yang lulus sertifikasi/uji kompetensi , pengembangan kompetensi manajerial, fungsional	600 orng	12.050.000.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah Peserta yang lulus sertifikasi/uji kompetensi , pengembangan kompetensi manajerial, fungsional	600 orng	2,941,311,384	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional		jumlah koordinasi dan sosialisasi kebijakan Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	2 Dokumen	250.000.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional		jumlah koordinasi dan sosialisasi kebijakan Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	2 Dokumen	000	
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara		Jumlah pembinaan pengelola LSP,	2 Lembaga	250.000.000	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara		Jumlah pembinaan pengelola LSP,	2 Lembaga		

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat if (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat if (Rp.000)	Catatan Penting
	Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi		dan penguatan tenaga asesor			Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi		dan penguatan tenaga asesor			
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi	165 orang	2.500.000.000	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi	165 orang	317,985,680	
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		pelaksanaan study tiru dan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN	2 Laporan	1.050.000.000	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		pelaksanaan study tiru dan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN	2 Laporan	193,653,00	
			JUMLAH PESERTA BIMTEK, WORKSHOP, TOT, MOT, TOC BAGI TENAGA PENGEMBANGAN KOMPETESI	2 Dokumen	150.000.000						
			PELAKSANAAN AKREDITASI LEMBAGA	1 Dokumen	250.000.000						
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga		Jumlah Monitoring Evaluasi Pelaksanaan kerjasama Kabupaten/kota	2 Laporan	7.000.000.000	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga		Jumlah Monitoring Evaluasi Pelaksanaan kerjasama Kabupaten/kota	2 Laporan	199,586,63	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat if (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat if (Rp.000)	Catatan Penting
			Jumlah peserta pelatihan	2 dokumen	300.000.000			Jumlah peserta pelatihan	2 dokumen		
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional		jumlah penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintah dalam negeri bagi pimpinan daerah, JPT dan jafung	5 dokumen	250.000	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional		jumlah penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintah dalam negeri bagi pimpinan daerah, JPT dan jafung	5 dokumen		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dan fungsional	550 orang	5.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dan fungsional	550 orang	2,230,086,07	
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan		Frekuensi pembinaan Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi,	1 kali	100.000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi,		Frekuensi pembinaan Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi,	1 kali		

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
	Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat kabupaten yang ditindaklanjuti sampai dengan tingkat Provinsi, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan Peningkatan Sumber Daya Masyarakat sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang. Pada forum PD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BPSDM. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan BPSDM Provinsi Jambi seperti tersaji dalam Tabel 7 berikut ini.

**Tabel 12. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2023**

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
				Target	Rupiah (000)	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Provinsi Jambi	1. Persentase penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur	95%	17.800.000.000	
2			2. Persentase kelulusan peserta sertifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	75%		

3	Pengembangan Kompetensi Teknis
4	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
6	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
7	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi

jumlah peserta yang lulus pengembangan kompetensi teknis	450 orang	6.600.000.000	
jumlah kebijakan teknis pusat yang disosialisasikan	1	250.000.000	
jumlah penyusunan standar perangkat pembelajaran	4 dokumen/d iklar	200.000.000	
jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi teknis, umum, inti dan pilihan	945 orang	6.000.000.000	
Frekuensi pembinaan Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	2 dokumen	150.000.000	

	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
8	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta yang lulus sertifikasi/uji kompetensi , pengembangan kompetensi manajerial, fungsional	550 orng	11.200.000.000	
jumlah koordinasi dan sosialisasi kebijakan Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	2 Dokumen	150.000.000	
Jumlah pembinaan pengelola LSP, dan penguatan tenaga asesor	2 Lembaga	150.000.000	
jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi	150 orang	2.000.000.000	

	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	pelaksanaan study tiru dan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN	2 Laporan	950.000.000	
		JUMLAH PESERTA BIMTEK, WORKSHOP, TOT, MOT, TOC BAGI TENAGA PENGEMBANGAN KOMPETESI	2 Dokumen	150.000.000	
		PELAKSANAAN AKREDITASI LEMBAGA	1 Dokumen	250.000.000	
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Monitoring Evaluasi Pelaksanaan kerjasama kabupaten/kota	2 Laporan	7.000.000.000	
		Jumlah peserta pelatihan	2 dokumen	250.000.000	
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	jumlah penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintah dalam negeri bagi pimpinan daerah, JPT dan jafung	5 dokumen	250.000.000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	550 orang	5.000.000.000	

			Kepemimpinan, dan Prajabatan dan fungsional			
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Frekuensi pembinaan Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 kali	100.000.000	

BAB III

TUJUAN. SASARAN. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tela'ah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran. Kebijakan Nasional Bidang Kepegawaian khususnya Pendidikan dan Pelatihan :

Tabel 13. Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

No	Jenis Kebijakan Nasional / Provinsi
1	<p>Perbaikan Tata Kelola Pemerintah</p> <p><i>Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan isu/kebijakan nasional berupa :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> o Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik
2	<p><i>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dengan isu/kebijakan nasional berupa :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penciptaan ruang-ruang partisipasi dan konsultasi publik
3	<p><i>Peningkatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi dengan isu/kebijakan nasional berupa :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan <i>Grand Design</i> dan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi - Penataan kelembagaan instansi pemerintah (K/LPNK/LNS) yang mencakup penataan fungsi dan struktur organisasi - Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah - Pengembangan manajemen SDM Aparatur - Sistem Seleksi PNS melalui <i>CAT System</i> - Pengembangan dan penerapan <i>e-Government</i> - Penerapan <i>e-Arsip</i> - Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur

4	<p><i>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan isu/kebijakan nasional berupa :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perluasan penerapan <i>e-service</i> untuk pelayanan publik - Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik - Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelayanan utama, perijinan dan investasi - Pembentukan unit Pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi - Membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi publik yang andal dan profesional
---	--

Khusus dibidang aparatur yang menjadi strategi dan arah kebijakan pembangunan adalah dengan pengembangan manajemen SDM aparatur berupa ***peningkatan sistem merit*** dalam manajemen kepegawaian, serta ***peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai***. Adapun indikator untuk penerapan sistem merit adalah berupa persentase penerapan sistem merit di setiap instansi. Sedangkan indikator untuk peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai berupa persentase pegawai yang mengikuti assesment sesuai kebutuhan, persentase pegawai yang mengikuti diklat wajib dan persentase penilaian kinerja pegawai berbasis prestasi kerja.

Sedangkan hasil perumusan Rancangan AkhirRPJMD Provinsi Jambi 2012-2026 pada misi kesatu yakni: **“Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan”**. kebijakan yang diperlukan adalah dengan meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*.

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang tujuannya “mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel” dengan sasaran meningkatnya kualitas pengelola dan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Strategi yang dilakukan yakni meningkatkan kualitas pengelolaan dan meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur. Strategi meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur

arah kebijakannya adalah meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui penguasaan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Untuk mencapai visi dan misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan suatu program dan kegiatan harus terus dilakukan secara berkelanjutan (*never ending process*). Untuk itu, komitmen yang sungguh-sungguh dari Pengelola, Penyelenggara dan Widyaiswara serta pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan pembaharuan guna meningkatkan kompetensi aparatur, merupakan suatu keharusan bagi terwujudnya kebijakan Badan Pengembangan Sumber daya Manusia dalam rangka pembaharuan secara esensial menjadi *leverage* yang berbasis kompetensi. Maka dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

T u j u a n

- a. Mengembangkan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan aparatur yang efektif
- b. Mengembangkan kelembagaan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan aparatur

S a s a r a n

Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan yakni;

- a. Meningkatnya kompetensi Aparatur melalui program dan kegiatan yang relevan sesuai dengan kebutuhan
- b. Meningkatnya sumber daya kediklatan yang memadai

3.3 Program dan Kegiatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan total anggaran belanja langsung Rp. 24,146,991,389.- (dua puluh empat milyar seratus empat puluh enam juta

Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah). Adapun rincian program dan kegiatan dari Belanja Langsung sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a. Pengembangan Kompetensi Teknis
- b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Langkah-langkah yang diambil untuk pencapaian target yang telah ditetapkan BPSDM Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja BPSDM Provinsi Jambi tahun 2023
- b. Menyusun tahapan kegiatan/anggaran
- c. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan

Indikator Kinerja BPSDM Provinsi Jambi disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021, pada misi kesatu yakni: ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Desa Yang Bersih. Transparan. Akuntabel dan Partisipatif serta berorientasi Pelayanan Publik.*** Kebijakan yang diperlukan adalah dengan meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*. Dalam Misi ke -1 RPJMD

Provinsi Jambi tujuan yang hendak dicapai oleh BPSDM Provinsi Jambi selama kurun waktu lima tahun depan adalah ***Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Kompetensi, Dedikasi dan Integritas***

dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 14. indikator kinerja utama BPSDM :

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Tahunan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2023	2023	2024	2025	2026	
1	NILAI SAKIP	66.60 B	66.60 B	66.61 B	66.62 B	66.63 B	66.64 B	66.65 B	100 %
2	Persentase penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur	99	93%	95%	97%	97%	99%	99%	75 %
3	Persentase kelulusan peserta sertifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	75%	72%	73%	74%	74%	75%	75%	85 %

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 BESERTA PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Provinsi Jambi			APBD			
2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		Provinsi Jambi			APBD			
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP	Provinsi Jambi	81,0%	25.155.000.	APBD		82,0%	31.558.000.000
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi keuangan	Provinsi Jambi	100%	975.000.000	APBD		100%	975.000.000
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur	Provinsi Jambi	100 buku	300.000.000	APBD		100 buku	300.000.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	pesentase penyusunan dokumen RKA-SKPD	Provinsi Jambi	50 buku	100.000.000	APBD		50 buku	100.000.000
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	persentase penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Provinsi Jambi	30 buku	50.000.000	APBD		30 buku	50.000.000
8	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	persentase penyusunan DPA-SKPD	Provinsi Jambi	50 buku	100.000.000	APBD		50 buku	100.000.000

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
9	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	persentase penyusunan perubahan DPA-SKPD	Provinsi Jambi	30 buku	50.000.000	APBD		30 buku	50.000.000
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Kediklatan dan laporan kinerja	Provinsi Jambi	200 buku	75.000.000	APBD		200 buku	75.000.000
11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase evaluasi kinerja daerah (Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur) dan penelitian karya tulis ilmiah	Provinsi Jambi	50 laporan	300.000.000	APBD		50 laporan	300.000.000
12			Provinsi Jambi			APBD			
13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi keuangan	Provinsi Jambi	100%	20.400.000.000	APBD		100%	20.400.000.000
14	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Provinsi Jambi		20.000.000.000	APBD			20.000.000.000
15	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	% Tingkat pemenuhan honorarium Tim Angka Kredit, Tim penjamin mutu SKPD, % Tingkat pemenuhan honorarium panitia pelaksana kegiatan, pengelola keuangan SKPD, % Tingkat pemenuhan honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat pengadaan barang/jasa,	Provinsi Jambi	7 dokumen	400.000.000	APBD		7 dokumen	400.000.000

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang SKPD, PPTK, staf PPTK, Staf PPKom, staf pajabat pengadaan, % Tingkat pemenuhan honorarium penyusun jurnal prajaiswara, % tingkat pemenuhan honorarium tim pengelola website							
16			Provinsi Jambi			APBD			
17	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi BMD PD	Provinsi Jambi	100%	200.000.000	APBD		100%	200.000.000
18	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	persentase penyusunan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	Provinsi Jambi	4 dokumen	50.000.000	APBD		4 dokumen	50.000.000
19	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	persentase Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Jambi	2 laporan	50.000.000	APBD		2 laporan	50.000.000
20	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Jambi	2 laporan	50.000.000	APBD		2 laporan	50.000.000
21	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Jambi	9 laporan	50.000.000	APBD		9 laporan	50.000.000
22			Provinsi Jambi			APBD			

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
23	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi retribusi daerah pendidikan dan pelatihan	Provinsi Jambi	100%	175.000.000	APBD		100%	175.000.000
24	Pengolahan Data Retribusi Daerah	persentase Pengolahan Data Retribusi Daerah	Provinsi Jambi	2 dokumen	175.000.000	APBD		2 dokumen	175.000.000
25			Provinsi Jambi			APBD			
26	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD	Provinsi Jambi	100%	1.435.000.000	APBD		100%	1.435.000.000
27	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Provinsi Jambi	3 Unit	400.000.000	APBD		3 Unit	400.000.000
28	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Jambi	150 Orang	200.000.000	APBD		150 Orang	200.000.000
29	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Provinsi Jambi	2 dokumen	60.000.000	APBD		2 dokumen	60.000.000
30	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Provinsi Jambi	2 Dokumen	150.000.000	APBD		2 Dokumen	150.000.000
31	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi Jambi	3 dokumen	75.000.000	APBD		3 dokumen	75.000.000
32	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase pengembangan kapasitas aparatur internal	Provinsi Jambi	80 orang	400.000.000	APBD		80 orang	400.000.000

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
33	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Jambi	25 Orang	75.000.000	APBD		25 Orang	75.000.000
34	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Jambi		75.000.000	APBD			75.000.000
35			Provinsi Jambi			APBD			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi umum PD	Provinsi Jambi	100%	1.860.000.000	APBD		100%	1.860.000.000
36	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Jambi	2 Paket	170.000.000	APBD		2 Paket	170.000.000
37	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Jambi	8 Paket	300.000.000	APBD		8 Paket	300.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Jambi	4 Paket	260.000.000	APBD		4 Paket	260.000.000
38	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Jambi	7 Paket	150.000.000	APBD		7 Paket	150.000.000
39	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi Jambi	2 dokumen	150.000.000	APBD		2 dokumen	150.000.000
40	Penyediaan Bahan/Material	persentase Penyediaan Bahan/Material	Provinsi Jambi	1 Paket	100.000.000	APBD		1 Paket	100.000.000

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
41	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Jambi	1 Laporan	60.000.000	APBD		1 Laporan	60.000.000
42	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Jambi	2 Laporan	450.000.000	APBD		2 Laporan	450.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	persentase Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Jambi	1 dokumen	150.000.000	APBD		1 dokumen	150.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	persentase Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 dokumen	70.000.000			1 dokumen	70.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah		100%	3.330.000.000			100%	3.330.000.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		29 unit	820.000.000			29 unit	820.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 unit	460.000.000			1 unit	460.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis Pengadaan Mebel		3 paket	300.000.000			3 paket	300.000.000

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10 unit	500.000.000			10 unit	500.000.000
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	persentase Pengadaan Aset Tetap Lainnya		2 unit	150.000.000			2 unit	150.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2 unit	500.000.000			2 unit	500.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 unit	300.000.000			1 unit	300.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2 unit	300.000.000			2 unit	300.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor		100%	1.965.000.000			100%	1.965.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 laporan	15.000.000			1 laporan	15.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3 Laporan	900.000.000			3 Laporan	900.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan		3 Laporan	150.000.000			3 Laporan	150.000.000

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Perlengkapan Kantor							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		4 laporan	900.000.000			4 laporan	900.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan BMD		2 Unit	3.220.000.000			2 Unit	3.220.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		29 Unit	350.000.000			29 Unit	350.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 unit	80.000.000			1 unit	80.000.000
	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemeliharaan Mebel		10 Unit	70.000.000			10 Unit	70.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		50 Unit	350.000.000			50 Unit	350.000.000
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	persentase Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		10 unit	70.000.000			10 unit	70.000.000

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		10 unit	1.100.000.000			10 unit	1.100.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		4 unit	200.000.000			4 unit	200.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2 unit	1.000.000.000			2 unit	1.000.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1. Persentase penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur		95%	17.800.000.000			95%	17.800.000.000
		2. Persentase kelulusan peserta sertifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi		75%				75%	
	Pengembangan Kompetensi Teknis	jumlah peserta yang lulus pengembangan kompetensi teknis		450 orang	6.600.000.000			450 orang	6.600.000.000
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan	jumlah kebijakan teknis pusat yang disosialisasikan		1	250.000.000			1	250.000.000

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah penyusunan standar perangkat pembelajaran		4 dokumen/diklar	200.000.000			4 dokumen/diklar	200.000.000
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi teknis, umum, inti dan pilihan		945 orang	6.000.000.000			945 orang	6.000.000.000
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan	Frekuensi pembinaan Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan,		2 dokumen	150.000.000			2 dokumen	150.000.000

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Evaluasi, dan Pelaporan							
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Peserta yang lulus sertifikasi/uji kompetensi , pengembangan kompetensi manajerial, fungsional		550 orng	11.200.000.000			550 orng	11.200.000.000
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	jumlah koordinasi dan sosialisasi kebijakan Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional		2 Dokumen	150.000.000			2 Dokumen	150.000.000
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara	Jumlah pembinaan pengelola LSP, dan		2 Lembaga	150.000.000			2 Lembaga	150.000.000

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	penguatan tenaga asesor							
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi		150 orang	2.000.000.000			150 orang	2.000.000.000
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	pelaksanaan study tiru dan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN		2 Laporan	950.000.000			2 Laporan	950.000.000
		JUMLAH PESERTA BIMTEK, WORKSHOP, TOT, MOT, TOC BAGI TENAGA PENGEMBANGAN KOMPETESI		2 Dokumen	150.000.000			2 Dokumen	150.000.000
		PELAKSANAAN AKREDITASI LEMBAGA		1 Dokumen	250.000.000			1 Dokumen	250.000.000
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Monitoring Evaluasi Pelaksanaan kerjasama Kabupaten/kota		2 Laporan	7.000.000.000			2 Laporan	7.000.000.000
		Jumlah peserta pelatihan		2 dokumen	250.000.000			2 dokumen	250.000.000
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan	jumlah penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintah dalam negeri bagi pimpinan daerah, JPT dan jafung		5 dokumen	250.000			5 dokumen	250.000.000

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Fungsional								
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dan fungsional		550 orang	5.000.000			600 orang	6.000.000.000
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Frekuensi pembinaan Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		1 kali	100.000			2 kali	250.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Jumlah Pagu Anggaran 2023(Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
I	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			22.338.350.290	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai IKM	B	17.824.822.249	
		PREDIKAT SAKIP	PREDIKAT SAKIP		
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi		275.661.784	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 dokumen	158.763.784	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200 laporan	43.500.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 laporan	73.398.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi keuangan	100%	14.625.208.550	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 org/bulan	14.424.108.550	

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Jumlah Pagu Anggaran 2023(Rp)	Keterangan
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 dokumen	201.100.000	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD	100%	148.000.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 orang	70.000.000	
2	pakaian dinas harian	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	78.000.000	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi umum PD	100%	445.951.345	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	32.298.950	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	158.162.695	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	49.200.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	24.007.700	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	182.282.000	
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	1.877.880.570	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.700.000	

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Jumlah Pagu Anggaran 2023(Rp)	Keterangan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1.144.986.690	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	15.153.880	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	716.040.000	
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan BMD	2 Unit	452.120.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	191.640.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	160.480.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	100.000.000	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1. Persentase penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur	95%	4.513.528.041	
		2. Persentase kelulusan peserta sertifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	75%		
I	Pengembangan Kompetensi Teknis	jumlah peserta yang lulus pengembangan kompetensi teknis	450 orang	1.572.216.657	

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Jumlah Pagu Anggaran 2023(Rp)	Keterangan
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi	945 orang	1.572.216.657	[#] BIMTEK ILEGAL DRAFTING
					[#] Bimtek Kepemimpinan Kepala Sekolah
					[#] Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah
					[#] BIMTEK PENGELOLAAN PERIZINAN BANGUNAN
					[#] BIMTEK PENGELOLAAN TERMINAL
					[#] BIMTEK PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI
					[#] Bimtek Revolusi Mental
					[#] Pelatihan Kewirausahaan Purna Bhakti Bagi ASN
					[#] Pelatihan Pemadam Kebakaran
					[#] PELATIHAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
					[#] Pelatihan Revolusi Mental Bagi ASN
II	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	persentase pelaksanaan sertifikasi/uji kompetensi , pengembangan kompetensi manajerial, fungsional	95%	2.941.311.384	
1	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi	600 orang	317.985.680	[#] Sertifikasi Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang/Jasa
					[#] Sertifikasi Kompetensi Personel Lainnya Pengadaan Barang/Jasa

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Jumlah Pagu Anggaran 2023(Rp)	Keterangan
2	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	2 Laporan	193.653.000	[#] Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN
					[#] Pelaksanaan Akreditasi Lembaga
3	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	2 Dokumen	199.586.630	[#] Kerjasama Antar Lembaga Pengembangan Kompetensi ASN
					[#] Webinar Kerjasama Pengembangan Kompetensi ASN
4	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	600 orang	2.230.086.074	[#] Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VIII Kab/Kota Se-Provinsi Jambi
					[#] Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VII Provinsi Jambi
					[#] Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN)
					[#] Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Provinsi Jambi
					[#] Pelatihan Pembentukan Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
					[#] Seminar BumDes
					[#] Seminar Inovasi Pelayanan Publik Bagi Pejabat Administrator Provinsi Jambi
					[#] SEMINAR JABATAN FUNGSIONAL
	TOTAL			22.338.350.290	

BAB V

P E N U T U P

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi diorientasikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang diukur dengan kualitas dan kuantitas peserta dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi *pencapaian* hasil. pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi. baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan sinergitas dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program dengan unit-unit kerja/instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat. provinsi. kabupaten/kota sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. maka Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi sangat diharapkan dapat dijadikan bahan kajian sehingga keberadaannya dapat mendukung Pemerintahan Provinsi Jambi dimasa yang akan datang.

Jambi, Februari 2022

KEPALA BADAN

H.M.ISKANDAR NASUTION.SH.M.SI

Pembina Utama Madya

NIP. 19650331 199403 1 006